



පිළිගිණු උපාධිකෘති තාලි
PEMERINTAH PROVINSI BALI
ශ්‍රී ලංකා මහලාංකිකාලි පිළිගිණුකාලි

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

කලාංකි පළාතේ ආරක්ෂා කළාංකි - තාලි (පිළිගිණු) ආරක්ෂා කළාංකි (පිළිගිණු) පිළිගිණුකාලි
JALAN PATIMURA NOMOR 77 DENPASAR – BALI (80234), TELEPON (0361), 223562
WEBSITE: www.diskelkan.baliprov.go.id EMAIL: dislautkan@baliprov.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI

NOMOR 07.1 TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI,

- MENIMBANG : a. bahwa dalam rangka pengelolaan informasi dan dokumentasi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Tahun 2023;
- b. bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan menuju pelayanan informasi cepat, mudah dan wajar dilingkungan Pemerintah Provinsi Bali, perlu menetapkan Klasifikasi Daftar Informasi Publik di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali
- MENINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
6. Peraturan Gubernur Bali Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi.
- MEMUTUSKAN
- MENETAPKAN : Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Tahun 2023

- PERTAMA : Penetapan Daftar Informasi Publik (DIP) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali yang wajib di sediakan dan diumumkan
- KEDUA : Daftar Informasi Publik Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali telah tersedia dan diumumkan pada diskelkan.baliprov.go.id (web resmi) sebagai laman resmi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bali,
pada tanggal 15 Maret 2023

Kepala Dinas Kelautan
dan Perikanan Provinsi Bali



Ir. Putu Sumardiana, MP
Pembina Utama Muda
NIP. 19670714 199403 1 003



பிளமிருகு ருபாபிசுமி காலி
PEMERINTAH PROVINSI BALI
බලසි ක්ලාමාලකරිකරිබරිකාකරි
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
රකුකි 1 පමිචුරාකරු 77 දෙපසර - බලි (80234), ටෙලෙපො (0361), 223562
JALAN PATIMURA NOMOR 77 DENPASAR – BALI (80234), TELEPON (0361), 223562
WEBSITE: www.diskelkan.baliprov.go.id EMAIL: dislautkan@baliprov.go.id

DAFTAR INFORMASI PUBLIK
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI TAHUN 2023

No	Judul Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat/Unit/Satker yang menguasai informasi	Penanggungjawab pembuat atau penerbit informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi Yang Tersedia		Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip
						Cetak	Softcopy	
1	Dokumen Rencana Strategis Tahun 2018-2023	Memuat tentang rencana strategis dinas kelautan dan perikanan tahun 2018-2023	Sekretariat	Fungsional Perencana	2018	√	√	Aktif
2	Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022	Memuat tentang rencana kerja tahun 2022 yang merupakan penjabaran dari Renstra	Sekretariat	Fungsional Perencana	2021	√	√	Aktif
3	Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023	Memuat tentang rencana kerja tahun 2023 yang merupakan penjabaran dari Renstra	Sekretariat	Fungsional Perencana	2022	√	√	Aktif
4	Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023	Memuat tentang pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan tahun 2023	Sekretariat	Fungsional Perencana	2023	√	√	Aktif
5	Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun 2022	Memuat tentang capaian program dan kegiatan yang telah dilaksanakan	Sekretariat	Fungsional Perencana	2023	√	√	Aktif
6	Dokumen SAKIP Tahun 2022	Memuat tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022	Sekretariat	Fungsional Perencana	2023		√	Aktif

7	Neraca, CALK, & LRA	Memuat tentang informasi keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan yang telah di audit	Sekretariat	Kepala Sub Bagian Keuangan	2023		√	Aktif
8	Peta Jabatan Tahun dan Kepegawaian Tahun 2023	Memuat tentang daftar informasi pejabat dan pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2022	Sekretariat	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	2023		√	Aktif
9	Dokumen Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan Kabupaten Buleleng	Memuat tentang rencana pengelolaan dan zonasi Kawasan Konservasi Perairan Kabupaten Buleleng	Bidang Kelautan	Sub Koordinator Unit Substansi Tata Ruang Laut	2018		√	Aktif
10	Dokumen Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan Kabupaten Karangasem	Memuat tentang rencana pengelolaan dan zonasi Kawasan Konservasi Perairan Kabupaten Karangasem	Bidang Kelautan	Sub Koordinator Unit Substansi Tata Ruang Laut	2018		√	Aktif
11	Standar Operasional Prosedur Proses Penerbitan SIUP, SIPI, SIKPI, SIPI ANDON, Buku Kapal, Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan	Memuat tentang alur/tata cara proses penerbitan SIUP, SIPI, SIKPI, SIPI ANDON, Buku Kapal, Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan	Bidang Perikanan	Sub Koordinator Unit Substansi Perikanan Tangkap	2020		√	Aktif
12	Standar Operasioanl Prosedur Sistem Informasi Cara Budidaya Ikan Yang Baik	Memuat tentang pedoman dalam mengakses sistem informasi Cara Budidaya Ikan yang Baik melalui aplikasi IndoGAP	Bidang Perikanan	Sub Koordinator Unit Substansi Perikanan Budidaya	2022		√	Aktif
13	Standar Operasional Prosedur Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan menggunakan Aplikasi SKP Online	Memuat tentang mekanisme penerbitan sertifikat kelayakan pengolahan menggunakan aplikasi SKP Online	Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Pembina Mutu	2021		√	Aktif
14	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No. 17/PERMEN-KP/2019	Memuat Persyaratan dan tata cara penerbitan sertifikat kelayakan pengolahan Kemneterian Kelautan dan Perikanan RI.	Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Kementerian Kelautan dan Perikanan RI	2019		√	Aktif
15	Standar Operasional Prosedur Inspeksi Lapangan Insidental Pengawasan Ruang Laut	Memuat tentang alur penanganan aduan masyarakat yang diterima dari pelapor terkait indikasi pelanggaran aturan pemanfaatan ruang laut di Provinsi Bali hingga pada penyampaian kembali hasil tindak lanjut laporan/pengaduan kepada pihak pelapor	Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Sub Koordinator Unit Substansi Pengawasan Sumber Daya Kelautan	2022		√	Aktif
16	Standar Pelayanan pada UPTD Pelabuhan Perikanan	Memuat tentang pedoman mekanisme dan prosedur pelayanan Jasa Pemanfaatan Lahan dan Bangunan, Pelayanan Tambat Labuh, serta pelayanan PAS Masuk Kendaraan	UPTD. Pelabuhan Perikanan	Kepala Seksi Tata Kelola dan Pelayanan Usaha	2022	√	√	Aktif
17	Standar Operasional Prosedur Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya	Memuat tentang pedomandalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sumberdaya yang terdapat pada kawasan konservasi	UPTD. Kawasan Konsevasi Perairan Provinsi Bali	Kepala Seksi Pengawasan dan Pemberdayaan Masyarakat Kawasan Konservasi Perairan	2019		√	Aktif

18	Standar Operasional Prosedur Sosialisasi/Penyadartahuan Masyarakat	Memuat tentang pedoman dalam pelaksanaan sosialisasi/penyadartahuan masyarakat pada kawasan konservasi	UPTD. Kawasan Konsevasi Perairan Provinsi Bali	Kepala Seksi Pengawasan dan Pemberdayaan Masyarakat Kawasan Konservasi Perairan	2019		√	Aktif
19	Standar Operasional Prosedur Mekanisme Pelaporan	Memuat tentang pedoman dalam kegiatan pelaporan oleh masyarakat terkait kejadian atau pelanggaran di kawasan konservasi	UPTD. Kawasan Konsevasi Perairan Provinsi Bali	Kepala Seksi Pengawasan dan Pemberdayaan Masyarakat Kawasan Konservasi Perairan	2019		√	Aktif
20	Standar Operasional Prosedur Pemantauan Sumberdaya	Memuat tentang pedoman dalam pelaksanaan pemantauan sumberdaya pada kawasan konservasi	UPTD. Kawasan Konsevasi Perairan Provinsi Bali	Kepala Seksi Potensi, Konservasi dan Rehabilitasi Kawasan Konservasi Perairan Bali	2019		√	Aktif
21	Standar Operasional Prosedur Retribusi Penerbitan Karcis Masuk Kawasan Konservasi Perairan untuk Kegiatan Pariwisata Alam Perairan	Memuat tentang pedoman dalam retribusi penerbitan karcis masuk untuk kegiatan pariwisata alam pada kawasan konservasi	UPTD. Kawasan Konsevasi Perairan Provinsi Bali	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali	2022	√	√	Aktif
22	Standar Operasional Prosedur Retribusi Penerbitan Karcis Masuk/Tanda Masuk Kawasan Konservasi Perairan untuk Kegiatan Penelitian	Memuat tentang pedoman dalam retribusi penerbitan karcis masuk/tanda masuk untuk kegiatan penelitian pada kawasan konservasi	UPTD. Kawasan Konsevasi Perairan Provinsi Bali	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali	2022	√	√	Aktif
23	Standar Operasional Prosedur Retribusi Kegiatan Foto dalam Kawasan Konservasi Perairan	Memuat tentang pedoman dalam retribusi kegiatan foto yang berada dalam kawasan konservasi	UPTD. Kawasan Konsevasi Perairan Provinsi Bali	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali	2022	√	√	Aktif
24	Standar Operasional Prosedur Retribusi Kegiatan Shooting Film/Dokumenter dalam Kawasan Konservasi Perairan	Memuat tentang pedoman dalam retribusi mengenai kegiatan shooting film/dokumenter yang berada dalam kawasan konservasi	UPTD. Kawasan Konsevasi Perairan Provinsi Bali	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali	2022	√	√	Aktif
25	Standar Operasional Prosedur Pengujian Mutu Hasil Perikanan	berisi informasi tentang alur proses layanan mutu pengujian dari sample yang diterima sampai keluar laporan hasil uji	UPTD. Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan Provinsi Bali	Kepala Seksi Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan Provinsi Bali	2018		√	Aktif
26	Standar Operasional Prosedur Penerimaan Retribusi Jasa Usaha dari Layanan Pengujian Mutu Hasil Perikanan	Berisi alur proses penerimaan retribusi dari pelanggan hingga akhir diterima oleh pihak Bank	UPTD. Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan Provinsi Bali	Kepala Sub. Bagian Tata Usaha	2018		√	Aktif
27	Standar Operasional Prosedur Seksi Penerapan	Berisi informasi tata cara penerbitan sertifikat kesesuaian dan tata cara penerbitan Surat Persetujuan Penggunaan Tanda SNI	UPTD. Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan Provinsi Bali	Kepala Seksi Penerapan Mutu Hasil Perikanan	2021		√	Aktif

28	Sistem Terintegrasi ISO 17025: 2017, ISO 17065: 2012, ISO 9001: 2015	Berisi informasi tentang uraian tugas, tanggung jawab, dan wewenang dalam pelaksanaan dokumen sistem terintegrasi ISO 17025: 2017, ISO 17065: 2012, ISO 9001: 2015	UPTD. Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan Provinsi Bali	Kepala UPTD. Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan	2021	√	√	Aktif
29	Standar Operasional Prosedur Pelayanan pada UPTD. Produksi Budidaya Air Payau/Laut	Berisi informasi tentang alur proses pelayanan pembelian benih, calon induk/induk, ikan konsumsi	UPTD. Produksi Perikanan Budidaya	Kepala Seksi Produksi Budidaya Air Payau/Laut dan Kepala Seksi Produksi Budidaya Air Payau/Laut	2022		√	Aktif
30	Petunjuk Teknis Budidaya Udang Vaname di Kolam Bundar	Berisi informasi tentang cara budidaya Udang Vaname yang baik di kolam bundar	UPTD. Produksi Perikanan Budidaya	Kepala Seksi Produksi Budidaya Air Payau/Laut	2022		√	Aktif
31	Petunjuk Teknis Budidaya Udang Vaname	Berisi informasi tentang cara budidaya Udang Vaname yang baik di tambak	UPTD. Produksi Perikanan Budidaya	Kepala Seksi Produksi Budidaya Air Payau/Laut	2022		√	Aktif
32	Standar Operasional Prosedur Pembenihan Udang Galah	Berisi informasi tentang cara pembenihan Udang Galah yang baik	UPTD. Produksi Perikanan Budidaya	Kepala Seksi Produksi Budidaya Air Payau/Laut	2022		√	Aktif
33	Standar Operasional Prosedur Pembenihan Ikan Nila	Berisi informasi tentang cara pembenihan ikan yang baik	UPTD. Produksi Perikanan Budidaya	Kepala Seksi Produksi Budidaya Air Payau/Laut	2022		√	Aktif
34	Standar Operasional Prosedur Kegiatan Rutin Sub. Bagian Tata Usaha	Berisi informasi tentang pelaksanaan kegiatan rutin pada sub. bagian tata usaha	UPTD. Produksi Perikanan Budidaya	Kepala Sub. Bagian Tata Usaha	2022		√	Aktif
35	Standar Operasional Prosedur Penerimaan Retribusi Jasa Usaha dari Layanan Penjualan Benih/Bibit dan Udang	Berisi alur proses penerimaan retribusi dari pelanggan hingga akhir diterima oleh pihak Bank	UPTD. Produksi Perikanan Budidaya	Kepala Seksi Produksi Budidaya Air Payau/Laut	2022		√	Aktif


 Kepala Dinas Kelautan dan
 Perikanan Provinsi Bali
 Ir. Putu Sumardiana, MP
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19670714 199403 1 003

5. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembar Daerah Provinsi Bali Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembar Daerah Provinsi Bali Nomor 146)

MEMPERHATIKAN : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor B.22.523/122/Sekret/Diskelkan

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

PERTAMA : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran I ini merupakan Informasi yang Dikecualikan

KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor B.22.523/122/Sekret/Diskelkan yang tercantum dalam lampiran II merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Ditetapkan di Bali,
pada tanggal 14 Maret 2023

Kepala Dinas Kelautan
dan Perikanan Provinsi Bali



Ira Putu Sumardiana, MP

Pembina Utama Muda
NIP. 19670714 199403 1 003

LAMPIRAN I

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI
BALI
NOMOR 06 TAHUN 2023
TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Memorandum dan Disposisi Pimpinan	UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf I dan pasal 6 ayat 3.d informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan	Menghambat Proses Pengambilan Keputusan/Kebijakan	Mengamankan proses pengambilan keputusan/kebijakan	Tidak Terbatas
2	Nota Dinas	UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf I dan pasal 6 ayat 3.d informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan	Menghambat Proses Penyusunan/Menghambat Pengambilan Kebijakan	Mengamankan proses pengambilan keputusan/kebijakan	Tidak Terbatas

3	Semua Data, Surat-Surat, Laporan, Penelitian, dan Dokumen Lainnya yang masih dalam proses dan belum dikuasai atau di dokumentasikan	- UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf I dan pasal 6 ayat 3.d informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan - UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Menghambat Proses Penyusunan/Menghambat Pengambilan Kebijakan	Mengamankan proses pengambilan keputusan/kebijakan	Tidak Terbatas
4	Arsip/Dokumen Nota Dinas, Memo Pimpinan yang dinyatakan sangat rahasia, terbatas, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya	- UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf I dan pasal 6 ayat 3.d informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan - UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Menghambat Proses Penyusunan/Menghambat Pengambilan Kebijakan	Mengamankan proses pengambilan keputusan/kebijakan	Tidak Terbatas
5	Data Kesehatan, Keluarga, Rekening, Tabungan, Pinjaman Pegawai, Hak Kekayaan Pribadi yang menurut peraturan tidak wajib untuk dibuka atau yang belum diverifikasi KPK untuk dibuka	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 6 ayat 3.c informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi	Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi	Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi	Tidak Terbatas

6	Identitas Informan, Pelaporan, dan/atau saksi, yang mengetahui adanya indikasi pelanggaran berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf a informasi yang menghambat proses penegakan hukum	Menghambat proses penegakan hukum	Mengamankan proses penegakan hukum	Tidak Terbatas
7	Data Retribusi penjualan benih udang galah dan vaname pemenuhan retribusi PAD	- UU KIP No. 14 Tahun 2008 - Perda No 3 Tahun 2018	Mengganggu proses penyusunan/menghambat kesuksesan kebijakan	Melindungi kerahasiaan dokumen	Tidak Terbatas



Menyetujui,

Ir. Putu Sumardiana, MP

Pembina Utama Muda

NIP. 19670714 199403 1 003

LAMPIRAN II

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI
BALI
NOMOR 06 TAHUN 2023
TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN



පිළිගිණු උපාධිකාරී තාමි
PEMERINTAH PROVINSI BALI
සිංහල නිකායානලය සභාපතිවරයාගේ

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

අංක 1/පිළිගිණු උපාධිකාරී තාමි (පිළිගිණු) 1/උපාධිකාරී (පිළිගිණු) 1/උපාධිකාරී (පිළිගිණු) 1
JALAN PATIMURA NOMOR 77 DENPASAR – BALI (80234), TELEPON (0361), 223562
WEBSITE: www.diskelkan.baliprov.go.id EMAIL: dislautkan@baliprov.go.id

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR B.22.523/122/Sekret/Diskelkan

Pada hari ini, Senin tanggal 13 bulan Maret Tahun 2023 bertempat di Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Bali telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Memorandum dan Disposisi Pimpinan	UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf I dan pasal 6 ayat 3.d informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan	Menghambat Proses Pengambilan Keputusan/Kebijakan	Mengamankan proses pengambilan keputusan/kebijakan	Tidak Terbatas
2	Nota Dinas	UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf I dan pasal 6 ayat 3.d informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan	Menghambat Proses Penyusunan/Menghambat Pengambilan Kebijakan	Mengamankan proses pengambilan keputusan/kebijakan	Tidak Terbatas
3	Semua Data, Surat-Surat, Laporan, Penelitian, dan Dokumen Lainnya yang masih dalam proses dan belum dikuasai atau di dokumentasikan	- UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf I dan pasal 6 ayat 3.d informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan - UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Menghambat Proses Penyusunan/Menghambat Pengambilan Kebijakan	Mengamankan proses pengambilan keputusan/kebijakan	Tidak Terbatas
4	Arsip/Dokumen Nota Dinas, Memo Pimpinan yang dinyatakan sangat rahasia, terbatas, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya	- UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf I dan pasal 6 ayat 3.d informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan - UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Menghambat Proses Penyusunan/Menghambat Pengambilan Kebijakan	Mengamankan proses pengambilan keputusan/kebijakan	Tidak Terbatas

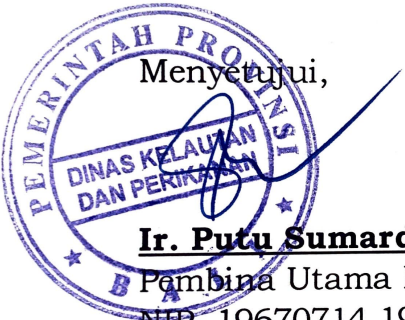
5	Data Kesehatan, Keluarga, Rekening, Tabungan, Pinjaman Pegawai, Hak Kekayaan Pribadi yang menurut peraturan tidak wajib untuk dibuka atau yang belum diverifikasi KPK untuk dibuka	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 6 ayat 3.c informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi	Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi	Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi	Tidak Terbatas
6	Identitas Informan, Pelaporan, dan/atau saksi, yang mengetahui adanya indikasi pelanggaran berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf a informasi yang menghambat proses penegakan hukum	Menghambat proses penegakan hukum	Mengamankan proses penegakan hukum	Tidak Terbatas
7	Data Retribusi penjualan benih udang galah dan vaname pemenuhan retribusi PAD	- UU KIP No. 14 Tahun 2008 - Perda No 3 Tahun 2018	Mengganggu proses penyusunan/menghambat kesuksesan kebijakan	Melindungi kerahasiaan dokumen	Tidak Terbatas

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebutkan pada tabel di atas dilakukan oleh :

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1	Ir. Putu Sumardiana, MP	Kepala Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Bali	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali	

2	Ir. I Made Dwi Wirya Astawa, M.Agb	Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali	
3	Dewa Ketut Yojana, S.Pi	Fungsional Perencana	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali	

Menyetujui,



Ir. Putu Sumardiana, MP
Pembina Utama Muda
NIP. 19670714 199403 1 003